

Abstract

The rise of corruption cases in Indonesia at this time every year is always increasing, this causes the community to feel uneasy with corruptors who are still rampant everywhere. The percentage and network of corruption Edy of the supreme court judge's Decision no.23 /Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mks is quite interesting to examine especially if we can see who the dominant actors are in this case, both from the planning process, the bidding process, the bid evaluation process and implementation and evaluation. This study uses a descriptive qualitative approach which illustrates the phenomenon of Edy corruption case in the supreme court's decision no.23/Pid.Sus-TPK/ 2019/Pn Mks. Descriptive analysis in this study uses the Nvivo 12 Plus software. Data from this Study were sourced from the supreme court decision no.23/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mks and previous research relating to the corruption of edy . the results of this discussion the conclusions that the author can take from the presentation of the analysis above are based on the decision of the supreme court no.23 / Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mks analyzed with nvivo12 Plus in general from the four processes above can be seen corporate 44%, Government 52%

Keyword : Corruption, procurement, network

ABSTRACT

Maraknya kasus korupsi di Indonesia saat ini setiap tahun selalu meningkat, ini menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman dengan koruptor yang masih merajalela di mana-mana. Persentase dan jaringan korupsi Edy dari keputusan hakim agung no.23 /Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mks cukup menarik untuk diteliti terutama jika kita dapat melihat siapa aktor yang dominan dalam kasus ini, baik dari perencanaan proses, proses penawaran, proses evaluasi penawaran dan implementasi dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan fenomena kasus korupsi Edy dalam keputusan mahkamah agung no.23 / Pid.Sus-TPK / 2019 / Pn Mks. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus. Data dari Studi ini bersumber dari keputusan pengadilan tertinggi no.23 / Pid.Sus-TPK / 2019 / Pn Mks dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan korupsi edy. hasil diskusi ini kesimpulan yang penulis dapat ambil dari penyajian analisis di atas didasarkan pada keputusan mahkamah agung no.23 / Pid.Sus-TPK / 2019 / Pn Mks dianalisis dengan nvivo12 Plus secara umum dari keempat proses di atas dapat dilihat coprorate 44%, Pemerintah 52%.

Kata kunci: Korupsi, pengadaan, jaringan